



Rumah Sehat
untuk Jakarta

RSUD Tanjung Priok

EVALUASI RENCANA KERJA
RSUD TANJUNG PRIOK
TRIWULAN II

2025



LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Penjelasan Umum

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mencakup penilaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Penilaian dimaksud berupa realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyerapan dana serta kendala yang dihadapi. Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-PD dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap triwulan dalam tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja RSUD Tanjung Priok dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja terutama evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan / subkegiatan dan penyerapan dana / anggaran indikatif kegiatan Renja.

Adapun tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah adalah untuk :

1. Menilai keselarasan program Renja-PD dengan Renstra-PD
2. Mengidentifikasi capaian pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menentukan langkah-langkah tindaklanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dengan target yang sudah direncanakan.

4. Menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renja-PD tahun berikutnya.

C. Metodologi

Dalam menyusun laporan evaluasi hasil Renja, RSUD Tanjung Priok menggunakan data kinerja yang terdapat pada Aplikasi e-MONEV. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini menggunakan *Gap Analysis* yaitu membandingkan antara realisasi dan target.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Evaluasi terhadap keselarasan Program Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra) dengan Renja RSUD Tanjung Priok;
2. Evaluasi terhadap capaian kegiatan / subkegiatan dan persentase serapan anggaran periode triwulanan.

E. Data dan Analisa

1. Keselarasan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renstra Dinas Kesehatan dan Renja RSUD Tanjung Priok

Tabel 1. Keselarasan Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara Renstra Dinas Kesehatan dengan Renja RSUD Tanjung Priok

No	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026			Renja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025		
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	5 (lima)	22 (dua puluh dua)	77 (tujuh puluh tujuh)	3 (tiga)	4 (empat)	4 (empat)

Renja RSUD Tanjung Priok merupakan turunan renstra Dinas Kesehatan. Terdapat 5 (lima) program dengan 21 Indikator program yang dirumuskan pada Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan prioritas dengan 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kegiatan di dalamnya dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan beserta masing-masing indikator kinerja sub kegiatan. Sedangkan pada Renja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) program dengan 4

(empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan turunan renstra Dinas Kesehatan untuk mendukung Rencana Kerja pada RSUD Tanjung Priok.

Penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2023-2026 merujuk pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejak diterbitkannya regulasi dimaksud maka seyogyanya terjadi proses penyesuaian atas pedoman dimaksud dalam proses penyusunan dokumen perencanaan secara hierarkis. Namun sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan proses perencanaan dan anggaran tahunan, maka proses ini berlaku sebaliknya yang diawali dengan proses penyesuaian nomenklatur kinerja pada tahapan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Tabel 2. Keselarasan Kegiatan Renstra dan Kegiatan Renja RSUD Tanjung Priok

Kode	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026		Kode	Renja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025	
	Kegiatan	Indikator Kegiatan		Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah pada Renja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025 seperti Tabel 2 di atas diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang diberlakukan mulai 1 Januari 2020.

Kegiatan-kegiatan pada Tabel 2 merupakan kegiatan dan indikator kegiatan yang merupakan turunan dari Renstra Dinas Kesehatan yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah, maupun untuk pemenuhan layanan pada RSUD Tanjung Priok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana indikatif yang tersedia untuk penyusunan kegiatan. kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah, termasuk dalam penjabarannya atas kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

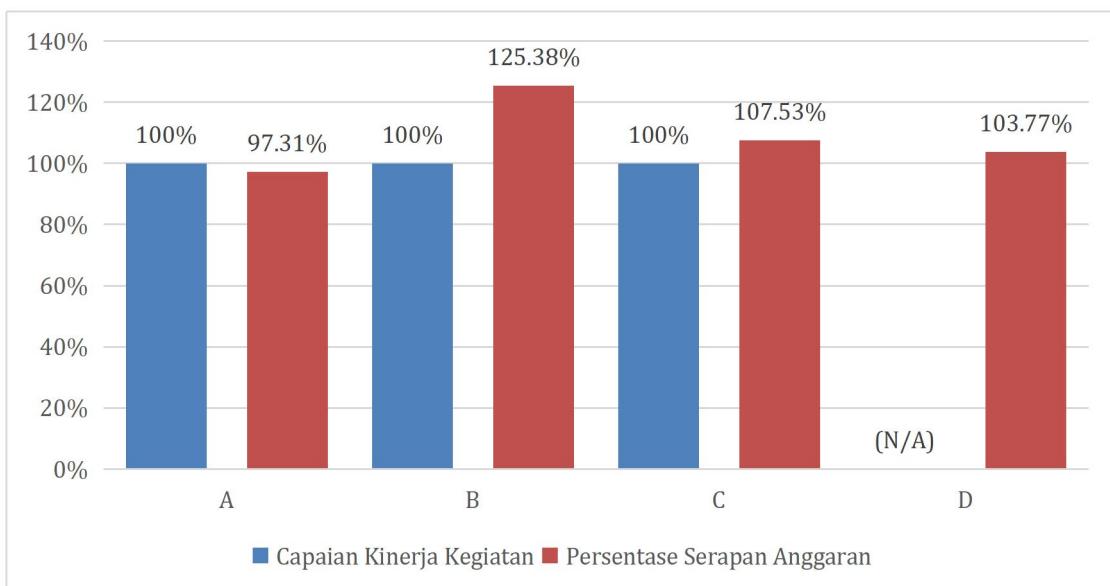
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini RSUD Tanjung Priok melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan.

2.1. Realisasi Kinerja Kegiatan dan Persentase Serapan Anggaran

RSUD Tanjung Priok

Capaian kinerja dan persentase serapan anggaran seluruh Kegiatan yang tercantum pada Renja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025 dapat dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini.



Sumber : EMonev Tahun 2025/Triwulan II

A :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
B :	Peningkatan Pelayanan BLUD
C :	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
D :	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Grafik 1. Capaian Kinerja Kegiatan dan Persentase Serapan Anggaran TW-II

Dalam Rencana Kerja RSUD Tanjung Priok Tahun 2025 terdapat 4 (empat) kegiatan yang indikator pelaksanaannya akan dilakukan penilaian per-triwulan. Seperti yang terlihat pada Grafik 1 di atas, pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang tidak memiliki target kinerja (N/A) pada TW-II.

Pada penyerapan anggaran beberapa kegiatan telah mencapai >90%, hal ini didukung karena tersedianya pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang mendukung indikator-indikator kegiatan dan subkegiatan, dan koordinasi internal yang baik sehingga seluruh target yang sudah ditetapkan pada target kinerja keuangan TW-II bisa tercapai.

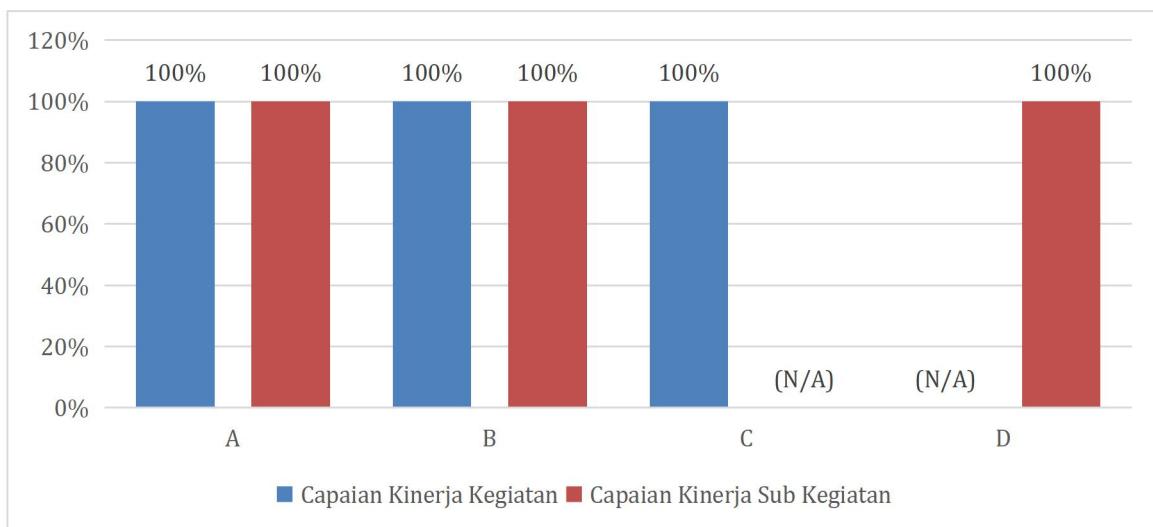
Tabel 3. Data Realisasi Kinerja Kegiatan dan Serapan Anggaran pada RSUD Tanjung Priok

Kode	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Kegiatan				Kinerja Keuangan			Ket
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja Kegiatan	Interpretasi	Target Keuangan TW II	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi /Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	Tinggi	339.600.000	330.473.020	97,31%	Tercapai
1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	4 Indeks	4 Indeks	100%	Tinggi	7.150.000.000	8.964.845.941	125,38%	Tercapai
1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	50 Persentase	50 Persentase	100%	Tinggi	1.580.000.000	1.699.000.000	107,53%	Tercapai
1.02.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar	N/A (tidak ada target)	N/A (tidak ada target)	-	-	6.250.000.000	6.485.734.642	103,77%	Tercapai

Catatan: Target tiap triwulan dan realisasi tiap triwulan mengikuti data yang ada pada Aplikasi eMONEV.

Pencapaian Kinerja Kegiatan RSUD Tanjung Priok pada TW-II keseluruhan telah tercapai dengan Interpretasi “Tinggi”, pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang tidak memiliki target kinerja (N/A) pada TW-II.

Kinerja Keuangan pada kegiatan TW-II keseluruhan telah tercapai karena tersedianya pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang mendukung indikator-indikator kegiatan dan subkegiatan, dan koordinasi internal yang baik sehingga seluruh target yang sudah ditetapkan pada target kinerja keuangan TW-II bisa tercapai.



A :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
B :	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
C :	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
D :	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Grafik 2. Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Subkegiatan

Tabel 2.2 Data Realisasi Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rata-rata Capaian
1	2	3
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	100%
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(N/A)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	(N/A)
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%

Berdasarkan tabel 2.2, Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan RSUD Tanjung Priok Tahun 2025 pada TW-II secara keseluruhan mencapai target. Hanya saja pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mempunyai target capaian kinerja (N/A) pada TW-II.

F. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Renja RSUD Tanjung Priok pada TW-II adalah perubahan aturan dari BPJS yang mengikat terkait persyaratan klaim kasus dan adanya renovasi ruang rawat inap sesuai dengan KRIS, sehingga berpotensi penurunan jumlah pasien rawat inap

Faktor pendorong dalam pelaksanaan Renja RSUD Tanjung Priok pada TW-II yaitu tersedianya pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang mendukung indikator-indikator kegiatan dan subkegiatan, dan koordinasi internal yang baik.

G. Kesimpulan dan Tindaklanjut

Keseluruhan target Kinerja dan target kinerja keuangan pada masing-masing kegiatan dan Subkegiatan pada TW-II telah tercapai dengan Interpretasi "Tinggi".

Tindaklanjut atas faktor penghambat tersebut adalah terus berkoordinasi yang baik dengan pihak eksternal maupun internal agar proses pencapaian target setiap triwulan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Jakarta, September 2025

Direktur RSUD Tanjung Priok

drg. Rully Dewi Anggraeni, MM
NIP 196909082000032005



Formulir E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025 TRIWULAN II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(15)			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.02.01 / PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	7.489.600.000	-	3.716.654.310	-	9.295.318.961	-	9.295.318.961
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.1.08 / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	339.600.000	4	164.139.835	4	330.473.020	4	330.473.020
3	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.02.01.1.08.0002 / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	339.600.000	3	164.139.835	6	330.473.020	6	330.473.020
4	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10 / Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	4	7.150.000.000	4	3.552.514.475	4	8.964.845.941	4	8.964.845.941
5	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.1.10.0001 / Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	7.150.000.000	1	3.552.514.475	1	8.964.845.941	1	8.964.845.941
6	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02 / PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-	1.580.000.000	-	299.000.000	-	1.699.000.000	-	1.699.000.000
7	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01 / Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	50	1.580.000.000	25	299.000.000	50	1.699.000.000	50	1.699.000.000
8	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.02.02.2.01.0014 / Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	N/A	1.580.000.000	N/A	299.000.000	N/A	1.699.000.000	N/A	1.699.000.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I		II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(15)	(1)	(2)
9	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03 / PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		- 6.250.000.000	- 3.323.440.271	- 6.485.734.642	- 6.485.734.642	- 6.485.734.642		
10	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02 / Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar	N/A 6.250.000.000	N/A 3.323.440.271	N/A 6.485.734.642	N/A 6.485.734.642	N/A 6.485.734.642	RSUD Tanjung Priok	
11	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	1.02.03.2.02.0002 / Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	149 6.250.000.000	212 3.323.440.271	164 6.485.734.642	164 6.485.734.642	164 6.485.734.642	RSUD Tanjung Priok	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: tersedianya pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang mendukung indikator-indikator kegiatan dan subkegiatan, dan koordinasi internal yang baik.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: perubahan aturan dari BPJS yang mengikat terkait persyaratan klaim kasus dan adanya renovasi ruang rawat inap sesuai dengan KRIS, sehingga berpotensi penurunan jumlah pasien rawat inap.

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya *) :

*) Diisi Kepala Bappeda

